

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*(Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari Melalui
Kelembagaan Lumbung Pangan Di Kenagarian Talaok Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan)*

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Proposal Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

HASANATUL RAHMI
NIM: 15042119

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan** (*Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari Melalui Kelembagaan Lumbung Pangan di Kenagarian Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*)

Nama : **Hasanatul Rahmi**

NIM/TM : **15042119/2015**

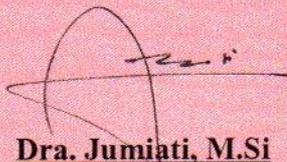
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial**

Padang, 31 Januari 2020

Disetujui oleh,
Pembimbing



Dra. Jumiati, M.Si
NIP.196211091986022001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa, 21 Januari 2020 Jam 13.00 WIB-14.00 WIB

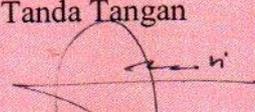
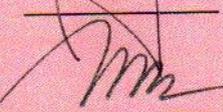
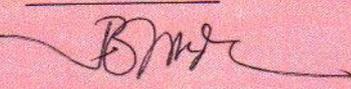
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

*(Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari Melalui
Kelembagaan Lumbung Pangan di Kenagarian Talaok Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan)*

Nama : Hasanatul Rahmi
NIM/TM : 15042119/2015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2020

Tim Peguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Jumiati, M.Si	1. 
Anggota	Afriva Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Ph.d	2. 
Anggota	Adil Mubarak, S.IP., M.Si.	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanatul Rahmi
NIM/TM : 15042119/2015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan (studi kasus pengelolaan cadangan pangan pemerintahan nagari melalui kelembagaan lumbung pangan di kenagarian talaok kecamatan bayang kabupaten pesisir selatan)”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



HasanatulRahmi

2015/15042119

ABSTRAK

Hasanatul Rahmi 15042119/2015: Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan

Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena ditemukan beberapa masalah dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Ada 3 (tiga) tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pangan dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif, Penelitian dilakukan di Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penentuan informan penelitian secara *purposive sampling*, yakni yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan yaitu Kasubag Perencanaan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Seksi Ketahanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Pihak Pemerintahan Nagari serta masyarakat yang ikut terlibat dalam program Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan sebanyak 4 (empat) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam pelaksanaannya masih diperlukan beberapa perbaikan seperti dari segi komunikasi masih adanya masyarakat yang belum memahami bagaimana pelaksanaan implementasi, dinas pangan berupaya untuk memberikan kembali sosialisasi dan pemahaman yang jelas kepada anggota. Kemudian upaya untuk mengatasi hambatan dari segi sumber daya, permasalahan terkait sarana dan prasarana seperti permasalahan mengenai penggunaan lahan, Dinas Pangan dan pemerintahan nagari berkoordinasi dengan pemilik tanah agar mau menghibahkan tanahnya untuk dibangunnya tempat penyimpanan (lumbung) pangan bagi masyarakat, yang pemilik tanah pun merangkap menjadi ketua pengurus. Kemudian upaya yang dilakuakn untuk anggota yang meminjam gabah/beras namun tidak dikembalikan Dinas Pangan terjun langsung menemui anggota tersebut untuk mengingatkan bahwa apa yang dipijam dari penyimpanan (lumbung) cadangan pangan harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama-sama. Sedangkan upaya yang dilakukan dinas pangan untuk lebih merespon dengan cepat keluhan masyarakat, Dinas Pangan akan berupaya untuk lebih sering memonitoring atau terjun kelapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan serta mendengar secara langsung keluhan-keluhan dari anggota dilapangan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, Cadangan pangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan** (*studi kasus pengelolaan cadangan pangan pemerintahan desa melalui kelembagaan lumbung pangan*)”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelenggaraan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang turut serta membantu penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan fasilitas untuk menempuh studi di fakultas tersebut.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H.,M.Hum.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Jumiati M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Afriva Khaidir, S.H.,M.Hum.,MAPA.,Ph.d dan Bapak Adil Mubarak, S.IP.,M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Kedua Orang Tua tercinta, Papa Zulkifli dan Mama Trimurni Syafniati sebagai kekuatan terbesar dan anugerah bagi penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat dan yang terbaik bagi penulis.
7. Abang dan adik sebagai harta berharga yang dimiliki penulis, Hasnul Fauzi dan M. Asy Ari
8. Teruntuk kekasih yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Ibu Rahmi Hamda Sari Kasubag perencanaan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu penulis dalam penelitian.
10. Bapak Mardoni Kasi Ketahanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu penulis dalam penelitian.
11. Bapak H. Syamsurijal selaku wali nagari dan salah satu pengurus cadangan pangan yang ada di kabupaten pesisir selatan.
12. Bapak Idris, Ibu Ermawati dan Bapak Ujang selaku anggota kelompok cadangan pangan.
13. Sahabat-sahabat sekampung yang senasib dan seperjuangan, yang sedari TK sampai sekarang Azrina Putri, Salminah Dira, Restina Rahmi, Saza Kurnia Utami, Surya Murdila Sari, Kesy Triwahyuni

14. Sahabat-sahabat seperjuangan yang dipertemukan untuk bersama-sama melewati masa perkuliahan hingga membuat banyak moment kebersamaan, Wulan Sari Fadilla, Rahmatia Gustin, Yofita Sari, Yelni Aprina, Mainisya Pertiwi
15. Rekan-rekan Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2015 yang telah mengukir banyak cerita dan pengalaman, terima kasih untuk kebersamaannya.

Semoga petunjuk dan motivasi yang bapak, ibu, dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Penulis beharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca Aamiin.

Padang, Desember 2019

Hasanatul Rahmi

ABSTRAK

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	14
1. Konsep Implementasi Kebijakan	14
2. Konsep Kebijakan Ketahanan Pangan	22
3. Konsep Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	29
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Konseptual	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36

C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian.....	42
B. Temuan Khusus Penelitian.....	45
1. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	45
2. Hambatan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten pesisir selatan.....	51
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan.....	55
C. Pembahasan.....	59
1. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	59
2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.....	66
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Konseptual.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	79
2. Dokumentasi Penelitian	82
3. Daftar Lokasi Lumbung Pangan Di Kabupaten Pesisir Selatan.....	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang dapat tercermin dari tercukupinya ketersediaan pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergisizi, merata serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18/2012).

Kemiskinan merupakan tanggung jawab utama pemerintahan, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan public dikatakan negara berkewajiban melayani setiap warga negaranya dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan public yang merupakan amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Layanan yang diberikan oleh pemerintah sangat menentukan upaya pemberdayaan masyarakat miskin guna pencapaian tujuan pembangunan nasional menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Angka kemiskinan di kabupaten pesisir selatan pada tahun 2014 mencapai 33 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2015, jumlah meningkat lagi menjadi 38 ribu dari total keseluruhan penduduk sekitar 450.186 jiwa, sebanyak 38 ribu jiwa penduduk yang dikategorikan miskin, masyarakat pesisir selatan yang berada dibawah garis kemiskinan rata-tara hanya

berpenghasilan rendah, kebutuhan masyarakat pesisir selatan perhanrinya dalam satu KK kita setarakan dengan mengkonsumsi sebanyak 2100 kilo kalori, berdasarkan inflasi, penghasilan perbulan ternyata itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (BPS 2016)

Dalam rangka menciptakan ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan di lakukan penjabaran dan rugulasi dari peraturan yang lebih merinci, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai penjabaran paraturan turunan dari Undang-Undang Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, untuk menciptakan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dilakukan kegiatan cadangan pangan pemerintahan desa/nagari yang dilakukan dengan produksi pangan poko tertentu diwilayah desa/nagari, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan di wilayah desa/nagari serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat desa/nagari dan potensi sumber daya lokal.

Sementara itu untuk melakukan aksi tercapainya kebijakan ketahanan pangan, adanya program-program yang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap ketahanan pangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintahan desa dilakukan dengan pengembangan lumbung pangan, lumbung pangan dikelola oleh masyarakat di dalam sebuah desa/nagari yang cadangan pangan yang dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/nagari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perseorangan sehari-hari.

Penyelenggaraan implementasi kebijakan ketahanan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat yang berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan yang bertujuan untuk: meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan bagi para petani, nelayan dan pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan sumber daya pangan nasional (suryati 2014).

Implementasi Kebijakan ketahanan pangan merupakan salah satu prasyarat dasar yang harus dimiliki oleh daerah disamping prasyarat lainnya

dalam rangka menciptakan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan dan daerah yang rawan pangan sesuai dengan tujuan implementasi kebijakan ketahanan pangan. kebijakan ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yakni subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya (Badan Ketahanan Pangan 2009)..

Upaya peningkatan ketahanan pangan mengacu pada prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN) periode 2015-2019, utamanya untuk memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka akses pangan, maka dibutuhkan langkah kebijakan yang mendukung proses keberhasilannya. Sehubungan dengan itu, pembangunan sistem untuk meningkatkan ketahanan pangan bersifat strategis.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga, serta menjamin konsumsi

pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu; melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan (badan ketahanan pangan 2009).

Disini peneliti lebih memfokuskan implementasi kebijakan ketahanan pangan dengan program pengelolaan cadangan pangan dilakukan dengan dalam rangka perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan lumbung dan pengisian cadangan pangan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketahanan pangan masyarakat petani agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan adanya pelaksanaan implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa/nagari, yang mana masyarakat petani mengelola cadangan pangan mereka sendiri secara berkelompok dalam wujud kelembagaan lumbung pangan.

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Alfis Basyir pada tanggal 9 September 2019 yang mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, dinas pangan menjalankan program pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa/nagari dengan pengembangan kelembagaan lumbung pangan yang dikelola penuh oleh masyarakat petani”

Kegiatan pengembangan kelembagaan lumbung masyarakat ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan cadangan pangan dalam masyarakat sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan

kesejahteraan masyarakat. implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan memiliki dua fungsi, yakni fungsi sosial sebagai cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan pada saat kondisi darurat seperti bencana alam dan paceklik, serta fungsi ekonomi di mana ketika produksi berlimpah dapat disimpan di lumbung dan pada saat harga sudah normal dapat dijual.

Kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan dengan pengembangan kelembagaan lumbung pangan masyarakat sebagai salah satu prasyarat strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Keberadaan lumbung pangan menjadi sangat relevan keberadaannya karena memberikan kemudahan dalam akses pangan, baik dari sisi keterjangkauan secara fisik maupun kemampuan daya beli.

Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan melakukan pengembangan kelembagaan lumbung pangan bertujuan untuk meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin akses dan kecukupan pangan serta meningkatkan modal kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan dan terhindar dari kerawanan pangan serta mengurangi kemiskinan, Kabupaten Pesisir Selatan sudah sejak lama menerapkan kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan namun masih ditemui daerah-daerah yang mengalami kerawanan pangan. Aspek cadangan pangan menjadi salah satu komponen penting yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara (juknis LPM 2019).

Pengelolaan cadangan pangan melalui program lumbung pangan ini, memiliki dua sisi relevansi yakni: pertama, memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya sinergitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluhan pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah. Kedua, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat sebagai bentuk implementasi kebijakan ketahanan pangan (juknis LPM 2019)

Kabupaten pesisir selatan telah melaksanakan implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan dalam wujud program pengembangan kelembagaan lumbung pangan sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 telah dibangun 23 tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat (lumbung pangan) yang dibangun melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pertanian. dan pada tahun ini Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan akan membangun satu (1) lagi lumbung sebagai tempat cadangan pangan melalui Dana Alokasi Desa (DAK) bidang pertanian.

Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan dalam wujud program lumbung pangan masyarakat, ada beberapa tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap

kemandirian. Pada tahap penumbuhan kegiatan yang dilakukan adalah idintivikasi kelompok, pemberian sosialisasi, seleksi kemudian jika kelompok lulus dalam seleksi maka akan ditetapkan dana untuk pembangunan fisik tempat penyimpanan (lumbung pangan) bagi anggota kelompok. Kemudian pada tahap pengembangan kegiatan yang dilakukan adalah verivikasi, pemberian sosialisasi kegiatan usaha, pemberian pelatihan bagi anggota, penyusunan rencana kegiatan usaha, penyaluran dana BANSOS kemudian pengisian cadangan pangan serta penguatan kelembagaan dan stok cadangan pangan masyarakat. Dan pada tahap kemandirian, anggota masih dibantu dengan dana BANSOS, penguatan kelembagaan lumbung pangan anggota dan penguatan cadangan pangan anggota serta pemberian pelatihan kepada anggota kelompok dalam menunjang keberlanjutan program cadangan pangan dan usaha ekonomi produktif anggota dengan diberikan sosialisai dan pendampingan.

Dalam pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok diharapkan dengan kegiatan ini anggota kelompok memiliki sumber pendapatan lain agar terjadinya peningkatan penghasilan bagi para kelompok petani, ini diharapkan dapat membantu perekonomian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat petani, dan diharapkan masyarakat tidak hanya tergantung dengan musim panen saja tetapi saat tidak musim panen atau pun saat musim panen terjadinya bencana masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari.

Kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok dilaksanakan oleh kelompok dengan mekanisme pembelian-penjualan, tunda jual dan lainnya yang diharapkan akan meningkatkan akumulasi pendapatan dan modal kelompok. Keseluruhan stok cadangan pangan yang dikelola kelompok bersifat dinamis dalam artian bahwa perputaran stok menjadi penentu peningkatan modal anggota kelompok yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usaha ekonomi produktif ini dilakukan dengan perputaran stok cadangan pangan masyarakat yang di dalam lumbung dengan menjual cadangan pangan tersebut kepada masyarakat sekitar agar tercapainya peningkatan modal kelompok kemudian juga dilakukan kegiatan tunda jual yang dilakukan sebagai upaya dalam menambah keuntungan penjualan gabah para petani. Tunda jual dilakukan saat musim panen namun terjadinya penurunan harga gabah anggota kelompok disarankan untuk menunda penjualan sampai harga gabah kembali normal agar tidak terjadinya kerugian untuk petani (juknis LPM 2019).

Namun dalam realitanya implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan cadangan pangan masyarakat dalam penguatan kelembagaan di kabupaten pesisir selatan tidak berjalan dengan baik dan belum mampu menyediakan kebutuhan akan kemudahan akses pangan bagi anggota kelompok. Karena adanya permasalahan dari internal kelompok yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan.

Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman anggota dalam pengelolaan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif

yang dijalankan, sosialisai yang kurang dipahami masyarakat, serta monitoring lapangan yang jarang dilakukan, yang mengakibatkan terjadinya permasalahan kurangnya pahamiannya anggota kelompok dengan sistem peminjaman bahan pangan yang dapat dipinjamkan kepada anggota, yang mengakibatkan banyak anggota yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika pinjaman tidak dikembalikan akan mengakibatkan stok cadangan pangan anggota pun menipis.

Pengisian stok cadangan pangan masyarakat telah di anggarkan oleh pemerintah, untuk pengisian gabah/beras yang nantinya kelompoklah yang akan mengembangkan secara mandiri stok pangan tersebut agar terciptanya usaha ekonomi produktif untuk penambahan pendapatan anggota kelompok. Jika tidak terjadinya perkembangan dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat tersebut maka tidak akan tercapainya kemudahan dan ketersediaan akan pangan maka masyarakat pun belum dapat dikatakan sejahtera. Setelah anggaran diturunkan kelembagaan diberikan wewenang untuk dapat mengembangkan cadangan pangan mereka sendiri dan pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok agar terpenuhinya ketersediaan pangan bagi anggota kelompok dan peningkatan modal kelompok.

Disinilah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam **Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan** (*studi kasus pengelolaan cadangan pangan pemerintahan nagari melalui kelembagaan lumbung pangan di kenagarian talaok kecamatan bayang kabupaten pesisir selatan*)

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Pengembangan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- b. Kurangnya sosialisasi dinas terkait kepada masyarakat sehingga masih adanya masyarakat yang belum memahami bagaimana pelaksana implementasi kebijakan tersebut
- c. Evaluasi dan monitoring lapangan jarang dilakukan oleh tenaga pendamping
- d. Permasalahan penggunaan lahan untuk pembangunan tempat cadangan pangan (lumbung)
- e. Adanya peminjaman terhadap gabah yang tidak dikembalikan oleh anggota kelompok
- f. Kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap bahan pangan sehari-hari masih menjadi masalah masyarakat petani

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Maka permasalahan dibatasi tentang implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten pesisir selatan.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari batasan masalah yang dicantumkan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa faktor penghambat dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pangan dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pangan dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam setiap kajiannya, yang mana manfaat tersebut akan dilihat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah/Instansi terkait, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan terkait kebijakan publik.
3. Bagi peneliti, Penelitian ini sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan terkait bidang ilmu administrasi negara terutama dalam bidang kebijakan publik serta sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh peneliti selama menjalani kuliah pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Dan juga merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.